

## ANALISIS PERAN SUKUK DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Husni Pasarela<sup>1</sup>, Fakhurradhi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>IAIN Takengon, Email: [husni18mei85@gmail.com](mailto:husni18mei85@gmail.com)

<sup>2</sup> IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireuen, Email: [fakhurradhihi@gmail.com](mailto:fakhurradhihi@gmail.com)

### ABSTRAK

*Di Indonesia perkembangan sukuk/ obligasi syariah terbilang cukup lambat dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Meskipun sukuk memiliki fungsi yang strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan ini diketahui bahwa peran fungsi sukuk dalam pembangunan ekonomi nasional ada 6 yaitu: (1) Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional, (2) Membantu BI dalam melakukan Open Market Operation (OMO), (3) Menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat, (4) Meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur, (5) Mendorong tertib pengelolaan BMN, (6) Mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur Pemerintah.*

*Kata Kunci: Peran Sukuk, Ekonomi Nasional*

### I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut senada dengan cerahnya pengembangan instrumen keuangan syariah. Salah satu yang menarik perhatian adalah sukuk. Sukuk secara sederhana yaitu sebagai surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan emiten, yang mewajibkan emiten membagikan hasil berupa margin kepada pemegang. Akad-akad pada sukuk ada yang berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, berbasis jual beli seperti istishna, salam, dan murabahah, sampai sewa menyewa seperti ijarah. Oleh karena itu hal-hal tersebutlah yang membuat sukuk berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis pada bunga sebagai marjinya.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2021 tumbuh 3,51 persen, yang mengartikan bahwa Indonesia belum stabil dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Saat ini, Indonesia dan semua negara di dunia menghadapi resiko resesi yang mengancam berbagai sektor di dalamnya yang diakibatkan adanya pandemi covid-19. Adanya pandemi covid-19, dapat berakibat pada defisitnya APBN maka peningkatan sektor rill diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar salah satunya dengan instrumen syariah yang berprinsip dengan bagi hasil. Menurut (Syauqi Beik, 2011) peran sukuk negara dalam pembangunan adalah sebagai alat meringankan defisit APBN yang mampu

digunakan pada pembangunan sektor rill. (Hastuti, 2018) menjelaskan lebih lanjut, bahwa sukuk retail dapat menjadi pionir dalam hal investasi syariah khususnya di bidang sukuk seperti Malaysia. Masifnya perkembangan instrumen syariah di Indonesia seharusnya konsep keuangan syariah yang diterima di Indonesia dapat membuat sukuk mengalami perkembangan yang pesat.

Pengembangan sukuk di Indonesia mampu mendorong pemerintah dalam menghadapi beberapa resiko yang berkenaan dengan likuiditas. Penerbitan SBSN saat ini telah menjadikannya sebagai instrumen pembiayaan utama, selain instrumen pembiayaan sebelumnya yakni Surat Utang Negara dan pinjaman langsung. Oleh karena itu meskipun SBSN merupakan instrumen baru dalam pembayaran obligasi (sukuk) dengan demikian, SBSN telah menunjukkan kemampuannya dalam membiayai defisit anggaran pemerintah.

Jika kita ulik kembali kebelakang, krisis moneter (Krismon) yang terjadi pada 1998 memberikan pengaruh yang signifikan. Seperti tingginya nilai suku bunga dan rendahnya nilai tukar rupiah. Hal ini salah satunya dikarenakan lemahnya pembangunan sektor rill dan hanya berpacu terhadap satu mata uang yakni US Dollar. Dari penelitian (Ramadayanti et al., 2018) dengan judul Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur, menunjukkan sektor konvensional cenderung bermain pada sektor finansial dibandingkan sektor rill yang

menyebabkan transaksi spekulatif berdasarkan nilai suku bunga, hasil penelitiannya diketahui bahwa terdapat enam sasaran infrastruktur dikembangkan antara lain: (1) Pembangunan jalan sepanjang 836 KM, (2) Pembangunan jembatan sepanjang 10.198 M, (3) Pembangunan 13 Bandara baru dan lanjutan, (4) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, (5) Pembangunan jalur kereta api tahap I dan lanjutan sepanjang 710 KM spoor, dan (6) Pembangunan terminal penumpang lanjutan di 3 lokasi maka peningkatan pembiayaan infrastruktur berbasis sukuk mengalami peningkatan dan telah menunjukkan sukuk menjadi instrumen penting dalam pembangunan sektor riil.

Pengembangan sukuk di Indonesia bertujuan untuk menyelaraskan program-program pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko Heripoerwanto dalam (Kusuma, 2020) yang mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan kolaborasi pembiayaan untuk mengejar gap infrastruktur di Indonesia, karenanya infrastruktur merupakan bagian penting kebutuhan masyarakat dalam peningkatan nilai konsumsi, akses lapangan kerja, kemakmuran nyata, dan stabilitas makro ekonomi. Hal ini dikarenakan kehalalan terhadap imbal hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi syariah akan menambah keyakinan investor untuk berinvestasi pada pasar modal syariah.

Perkembangan sukuk saat ini harus dapat dimasifkan sebagai upaya peningkatan *market share sukuk* dengan membuat beberapa strategi dalam hal edukasi, komunikasi, pemasaran, dan pengembangan untuk mengakomodir percepatan dan pertumbuhan obligasi syariah/ sukuk. Sukuk dapat mendorong perkembangan pasar keuangan syariah untuk menciptakan *branchmark* di pasar keuangan syariah dan diversifikasi basis investor dalam mengembangkan instrumen investasi dan memanfaatkan dana-dana yang belum terjaring oleh sistem konvensional (Latifah, 2020). Asiyah, dkk dalam hasil kajiannya menyimpulkan bahwa sukuk menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan, sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dalam jangka panjangnya (Asiyah et al., 2020). Perencanaan ini juga harus menetapkan struktur yang diperlukan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan mengurangi ketidak seimbangan antara mikro dan makro ekonomi.

Dari paparan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui lebih dalam bagaimana perkembangan sukuk sebagai instrumen investasi syariah serta peranannya pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis *library research*, dimana permasalahan penelitian dilandasi pada data-data yang berasal dari berbagai literatur. (Moeloeg, 2007) penelitian kualitatif bermakna untuk memahami fenomena tentang apa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi ditinjau dari subjek penelitian. Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati (Sugiyono, 2016). Adapun Identifikasi data-data pada penelitian ini dilalui dengan prosedur berikut:

- 1) Merumuskan tujuan secara spesifik terkait hal-hal yang ingin dicapai.
- 2) Mengidentifikasi istilah-istilah penting yang harus dijelaskan secara mendalam seperti sukuk.
- 3) Mengkhususkan unit analisis, yakni pertumbuhan ekonomi nasional.
- 4) Mencari data dan sumber yang relevan.
- 5) Membangun hubungan rasionalitas dan konseptual agar menghasilkan hasil yang berkenaan dengan tujuan penelitian.

Sumber penelitian ini ialah data-data sekunder yang bersumber pada studi pustaka, literatur, dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik atau penelitian yang ditulis.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan sukuk di Indonesia masih terbilang cukup masif dibandingkan dengan negara-negara muslim yang lain. Seperti halnya Malaysia, pengembangan keuangan syariah di Malaysia telah menjadikannya sebagai pasar sukuk terbesar. (Jarkasih, Muhamad & Slamet, 2009) bahkan pada tahun 2007 hampir 70% dari total emisi sukuk di dunia diterbitkan di Malaysia.

Beberapa tinjauan yang dapat diperharikan di Indonesia dalam mengoptimalkan peran sukuk pada pembangunan ekonomi nasional antara lain:

### 1. Pengembangan struktur dengan inovatif

Struktur sukuk di Malaysia disesuaikan dalam rangka membidik target pasar yang lebih spesifik. Sehingga sukuk yang ditawarkan sesuai dengan keadaan para investor seperti perubahan basis. Misalnya dari struktur sukuk berbasis hutang dengan jual beli (murabahah) menjadi ijarah atau sewa-menyewa, bagi hasil atau musyarakah, kontrak kerja atau istishna, dan sukuk campuran.

### 2. Perlakuan hukum yang jelas dan pasti

Perlakuan hukum dibuat sejelas mungkin (meminimalkan peraturan atau hukum yang bias). Langkah ini guna memberi kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk berinvestasi khususnya pada instrumen sukuk. Misalnya dengan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi sukuk pada peraturan permodalan dapat dicapai melalui adopsi *capital adequacy standard* yang dikeluarkan oleh IFBS.

### 3. Berfokus terhadap sistem pengembangan keuangan islam secara komperhensif

Menurut (Jarkasih, Muhamad & Slamet, 2009) pada hal ini dapat mengadopsi strategi yang digunakan Malaysia penciptaan lingkungan yang efektif bagi penerbitan sukuk yakni dengan membuat peraturan yang memfasilitasi bagi penerbitan sukuk, insentif dalam aktivitas investasi, *competitive pricing*, dan kerangkakerja dan hukum syariah yang jelas di negara tersebut.

Tujuan pembangunan nasional ialah mendapatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan memiliki basis yang luas. Pembangunan ini seharusnya dilakukan di berbagai wilayah (Provinsi dan Kota/ Kabupaten) sehingga memunculkan efek berganda dalam praktiknya. Adapun fungsi sukuk dalam pembangunan nasional adalah:

#### 1) Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional

Beberapa peneliti telah mengemukakan relevansi penerbitan SBSN dengan perkembangan industri keuangan syariah. Azwar mengemukakan bahwa kepemilikan sukuk negara domestik pada perbankan syariah sebagai bagian penyediaan aset yang aman bagi perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP yang mengukur perkembangan perbankan syariah (Iskandar, 2014). Tersedianya SBSN menjadi alternatif investasi bagi industri keuangan syariah yang mengalami eksekusi likuiditas maupun ingin mengembangkan aset melalui SBSN. Selain itu, untuk keperluan mengatur

likuiditas industri keuangan syariah dapat memperjualbelikan SBSN sesuai dengan kebutuhan. Telah tersedia berbagai tenor SBSN, baik jangka pendek (tenor 6 bulan) sampai dengan tenor panjang (diatas 10 tahun). Tersedianya diversifikasi tenor tersebut memberikan kemudahan bagi industri dalam mengatur portofolio investasinya.

#### 2) Membantu BI dalam melakukan Open Market Operation (OMO)

Dalam rangka menjaga tingkat inflasi (inflation targeting) otoritas moneter (BI) melakukan beberapa kebijakan diantaranya adalah mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Biasanya BI melakukan operasi pasar terbuka (open market operation/OMO) dengan cara mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Untuk melakukan OMO tersebut BI memerlukan beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Saat ini, dengan tersedianya SBSN dalam tenor pendek (6 bulan) BI dapat memanfaatkan instrumen tersebut untuk melakukan OMO. BI dapat memperoleh SBSN jangka pendek dengan membeli di pasar perdana pada saat pemerintah mengadakan lelang SBSN bertenor pendek atau disebut sebagai Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPNS). Ketika OMO dilaksanakan BI dapat menggunakan SPNS untuk memengaruhi jumlah uang beredar dengan memperjualbelikannya kepada industri keuangan terutama perbankan. Ketika BI ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka BI dapat menjual SPNS ke perbankan sehingga uang yang beredar masuk ke BI. Demikian sebaliknya ketika BI ingin menambah jumlah uang beredar BI dapat membeli kembali SPNS yang ada di industri keuangan, sehingga uang akan mengalir ke masyarakat. Penggunaan SPNS ini digunakan terutama ketika BI akan mengadakan OMO dengan partner industri keuangan syariah. Hal ini dikarenakan industri keuangan syariah hanya dapat menerima instrumen keuangan syariah saja sebagai portofolio aset mereka (Hariyanto et al., 2018).

#### 3) Menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat

Seiring dengan perkembangan ekonomi, industri keuangan maupun non keuangan serta individu masyarakat Indonesia, tentu memerlukan instrumen investasi untuk

meningkatkan nilai aset yang mereka miliki. Dengan adanya penerbitan SBSN akan memberikan tambahan instrumen investasi bagi pihak-pihak yang memiliki surplus dana. SBSN menjadi sangat menarik karena dijamin pembayaran imbalan mauun pokok investasinya oleh Pemerintah, sehingga dapat dikatakan sebagai instrumen investasi bebas risiko (zero risk). Selain bebas risiko, berinvestasi pada SBSN saat ini dianggap lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan instrumen investasi yang memiliki fitur yang hampir sama, misalnya deposito. Hal ini dikarenakan, SBSN biasanya memberikan imbal hasil yang lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan instrumen deposito yang diterbitkan oleh BUMN. Dengan diterbitkannya SBSN untuk investor ritel atau perorangan, secara tidk langsung juga telah mendukung pengembangan keuangan inklusif. Adanya SBSN untuk investor perorangan, misalnya Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Negara Tabungan, telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk ikut berinvestasi dan mengembangkan aset yang mereka miliki.

- 4) Meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur  
APBN Penerbitan seri-seri Sukuk Negara yang menggunakan underlying asset berupa proyek infrastruktur telah bertambah luasnya ruang fiskal APBN. Pendanaan pembangunan infrastruktur yang seharusnya berada pada pos Belanja Negara ditarik sebagian ke pos Pembiayaan. Hal ini menambah ruang di pos Belanja Negara untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan infrastruktur lainnya. Dengan begitu, dalam satu tahun anggaran akan semakin banyak proyek Pemerintah yang dapat dibiayai baik dari pos Belanja maupun Pembiayaan. Dimasa yang akan datang, Pemerintah berencana agar penerbitan SBSN lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat, maka kemampuan masyarakat dalam menyerap penerbitan SBSN juga akan semakin meningkat. Pemanfaatan penerbitan SBSN untuk pembangunan infrastruktur juga mempunyai arti memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut membantu pembangunan bangsa.
- 5) Mendorong tertib pengelolaan BMN

Perlunya penyediaan underlying asset dalam penerbitan SBSN dalam bentuk BMN telah mendorong tertib administrasi pengelolaan BMN. Underlying asset berupa BMN yang akan digunakan dalam penerbitan SBSN disyaratkan dalam kondisi bersih dari sengketa kepemilikan (clean) dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap (clear) seperti bukti kepemilikan, dll. Persyaratan ini telah mendorong Kementerian/Lembaga untuk menyediakan kelengkapan administrasi tersebut, sehingga BMN berstatus clean and clear. Penggunaan BMN untuk underlying asset saat telah menggerakkan instansi Pemerintah untuk melakukan tertib administrasi dan pengelolaan aset-aset yang dimilikinya. Secara makro, hal ini akan memperkuat posisi akuntabilitas aset-aset yang dimiliki oleh negara. Pemanfaatan BMN ini juga mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian kembali terhadap aset negara, sehingga benar-benar diketahui harga riil dari aset negara tersebut. Adanya revaluasi aset tersebut terbukti meningkatkan nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah.

- 6) Mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur Pemerintah  
Demikian halnya dalam pengelolaan proyek infrastruktur oleh Kementerian/Lembaga, dengan dijadikan sebagai underlying asset pengelolaan proyek didorong menjadi lebih tertib terutama dalam hal progress pelaksanaan proyek dan penarikan dana sesuai yang direncanakan. Penyelesaian proyek sesuai dengan waktunya merupakan persyaratan syariah sebagaimana diatur dalam struktur akad yang digunakan. Penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu menimbulkan ketidaksesuaian dengan kontrak yang telah diatur, sehingga harus dicegah agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks.

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

Sukuk merupakan investasi syariah yang halal dan terbebas dari adanya praktik maysir, gharar, dan riba. Sedangkan Pembangunan ekonomi dalam pandangan islam merupakan cara perubahan yang meliputi terencana, indoktrinasi, koersif, teknokratis, interaksional, sosialisasi, emulatif, dan alamiah. Adapun sukuk memiliki fungsi dalam menunjang pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional
2. Membantu BI dalam melakukan Open Market Operation (OMO)
3. Menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat
4. Meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur
5. Mendorong tertib pengelolaan BMN
6. Mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur Pemerintah

Dari analisis yang dilakukan diatas alangkah baiknya pemerintah menggenjot pasar sukuk agar mampu bersaing dengan negara asing, dan dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih kompetitif. Sebab potensi Indonesia cukup besar karena memiliki jumlah populasi umat muslim terbanyak dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya.

#### REFERENSI

- Asiyah, B. N., Aini, I. N., Mahardika, R. P., & Laili, L. N. (2020). Analisis Dampak Sukuk pada Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid 19. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(1). <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.55-68>
- Hariyanto, E., Syariah, P., & Keuangan, K. (2018). *PERAN STRATEGIS SUKUK NEGARA*.
- Hastuti, E. S. (2018). SUKUK TABUNGAN : INVESTASI SYARIAH PENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence>.

v7i2.4096

- Jarkasih, Muhamad & Slamet, A. R. (2009). Perkembangan pasar sukuk: perbandingan indonesia, malaysia, dan dunia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi: Antisipasi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*, 1(2).
- Kusuma, H. (2020). *Daya Saing Infrastruktur RI Masih Tertinggal Jauh dari Negara Lain*. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5089444/daya-saing-infrastruktur-ri-masih-tertinggal-jauh-dari-negara-lain>
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Moeloeg, L. . (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ramadayanti, R. S., Mainata, D., & Pratiwi, A. (2018). Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Al-Tijary*, 2(2). <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.788>
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian dan Pengembangan*. Bandung. In *Penerbit Alfabeta*.
- Syauqi Beik, I. (2011). Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 2(2).